I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Secara keseluruhan daerah Lampung memiliki luas daratan 34.623,80 km², kota Bandar Lampung merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang memiliki wilayah pesisir. Wilayah ini memiliki daratan seluas 192,21 km² dengan panjang garis pantai 27,01 km² dan luas kampung pesisir 56,57 km² dari kelurahan Srengsem kecamatan Panjang hingga kelurahan Keteguhan kecamatan Teluk Betung Barat (BPN,1998).

Sebagai ibu kota provinsi sekaligus kota terbesar di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung mempunyai aktivitas ekonomi yang cukup tinggi sehingga memberikan pengaruh yang nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota, termasuk di dalamnya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi ternyata belum merata dirasakan oleh seluruh masyarakat kota. Salah satu indikatornya adalah masih terdapat pemukiman kumuh di beberapa bagian kota yang mencerminkan masih adanya kantong-kantong kemiskinan.

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi pada negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2011 mencapai

30.018,93 juta jiwa atau mencapai 12,49% dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu data kemiskinan di Provinsi Lampung adalah 1.298,71 ribu orang (16,93%) dari jumlah penduduk 7.608.405 jiwa. Provinsi Lampung berada pada urutan kedua termiskin di Sumatera dan urutan kesembilan di Indonesia (www.bps.go.id. Diakses pada 29 April 2012).

Kawasan pesisir Kota Bandar Lampung merupakan kawasan yang dikategorikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung sebagai kantong kemiskinan kota Bandar Lampung. Kesulitan mengatasi masalah kemiskinan di desa-desa pesisir menjadikan wilayah pesisir termasuk wilayah yang rawan di bidang sosial ekonomi. Kerawanan di bidang sosial ekonomi dapat menjadi lahan subur bagi timbulnya kerawanan-kerawanan di bidang kehidupan yang lain.

Tidak hanya miskin, tetapi daerah pesisir kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran lingkungan yang sudah tidak dapat di tolerir sehingga mengakibatkan degradasi kawasan dan lingkungan pesisir. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa desa pesisir merupakan salah satu bagian wilayah pesisir yang sangat ter-*marginal*-kan, oleh karena itu desa-desa pesisir sangat potensial menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Menurut Refniyanti (2010: 2—3) Kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga nelayan di wilayah pesisir berakar dari faktor-faktor kompleks yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor alamiah, yaitu berkaitan dengan *fluktuasi* musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi wilayah pesisir. Faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi

penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya jaringan pemasaran dan belum maksimalnya fungsi koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang telah berlangsung sejak seperempat abad terakhir ini.

Wilayah pesisir Kota Bandar Lampung yang kaya dan berpotensi mendorong berbagai pihak pengguna (*stakeholders*) untuk mengeksploitasinya secara berlebihan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ancaman terhadap status kawasan ini dapat berasal dari pencemaran perairan laut akibat limbah domestik dan limbah industri, masalah penimbunan atau reklamasi pantai, pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, serta adanya konflik pemanfaatan ruang antara masyarakat dengan para *stakeholders* lainnya yang berakibat pada terjadinya konflik.

Pola pemanfaatan kekayaan sumber daya di wilayah pesisir dan laut Kota Bandar Lampung diharapkan dapat mencapai tingkat pemanfaatan yang optimal dan efisien sehingga tercapai pola pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, adalah dengan mengembangkan wilayah-wilayah pesisir yang ada di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Dalam rangka pengembang wilayah-wilayah pesisir tersebut, perlu terlebih dahulu diketahui akar permasalahan dan potensi wilayah-wilayah pesisir. Langkah awal dalam upaya pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan adalah melakukan kegiatan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pemahaman yang menyeluruh tentang kondisi ini dapat dikembangkan untuk pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan secara berkesinambungan.

Terkait hal tersebut perlu dilakukan reorientasi kebijakan terhadap pola pengelolaan dan pemanfataan sumber daya wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Sebagai langkah awal dalam menciptakan prakondisi reorientasi kebijakan pola pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, maka warga pesisir Kota Bandar Lampung turut serta dilibatkan melalui langkah pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan langkah awal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Selain itu memberdayakan warga untuk menjaga wilayah mereka bermukim akan lebih optimal karena rasa dari kepemilikan mereka.

Dapat kita lihat, bahwa selama ini pembangunan dan pengatasan masalah yang dilakukan selalu diidentikkan dengan pembangunan dan pengatasan masalah secara fisik. Akibatnya manusia sebagai pelaku dan sasaran pembangunan itu sendiri kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal pada hakekatnya pembangunan yang dilakukan seharusnya pembangunan manusia. Melibatkan masyarakat dalam menangani masalahnya sendiri merupakan konsep yang membangun dan mencerdaskan manusia. Siapa lagi yang paham penyakit yang dirasa kalau bukan orang yang merasakan penyakit tersebut. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan mereka dalam suatu wadah formal yang disebut organisasi masyarakat.

Masyarakat sekitar pesisir Kota Bandar Lampung memiliki mata pencaharian yang memanfaatkan hasil laut. Sedangkan pada masa sekarang yang merupakan masa-masa sulit, dirasa kurang relevan. Banyak permasalahan yang hadir dalam kehidupan warga di pesisir, yang paling krusial adalah masalah ekonomi dan

masalah pencemaran lingkungan. Masalah ekonomi yakni terkait dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kaum perempuan atau ibu rumah tangga mengeluh dengan pendapatan yang di dapat sang suami dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian masalah pencemaran lingkungan yang sangat berdampak bagi kerusakan ekosistem laut dan keindahan laut yang disebabkan oleh penumpukan sampah yang terdapat di sekitar laut pesisir Kota Bandar Lampung khususnya pencemaran sampah di bibir pantai.

Dari permasalahan tersebut, masyarakat pesisir merasa mengeluh dari keadaan yang mereka alami. Keluhan-keluhan tersebut terakumulasi sehingga muncullah aspirasi-aspirasi yang membentuk mereka dalam suatu wadah atau komunitas untuk menuntut hak-haknya dan juga bertujuan untuk pengembangan diri mereka. Masalah kemiskinan dan pencemaran lingkungan yang dirasakan selama ini serta-merta membuat para kaum perempuan mencari solusi sebagai pemecahan atas permasalahan yang mereka alami.

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Kota Bandar Lampung dibentuk dari munculnya pemikiran-pemikiran para perempuan pesisir yang menginginkan perubahan dengan memberdayakan masyarakat pesisir, yang khususnya para kaum perempuan untuk bergabung dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul. Dari organisasi ini lah mereka membuat strategi dan berupaya untuk merubah hidup mereka ke arah yang lebih baik dengan cara memberdayakan masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung dengan program-program yang mereka buat sendiri.

Salah satu program yang menjadi prioritas utama kaum perempuan pesisir Kota Bandar Lampung ini adalah program daur ulang sampah. Kalau sebelumnya sampah hanya menjadi alasan bagi pemerintah untuk menggusur wilayah Pesisir, akan tetapi sampah dapat disulap menjadi berbagai kerajinan tangan dan pupuk kompos. Kegiatan ini sangat menguntungkan dan sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir, karena pendaur ulangan sampah secara langsung mengurangi dampak pencemaran lingkungan ekosistem laut yang terjadi di sekitar laut pesisir yang kemudian hasil olahan tangan tersebut di distribusikan untuk di pasarkan sehingga menjadi pendapatan yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat pesisir.

Berdasarkan data Kecamatan Teluk Betung Selatan, dari segi pekerjaan hingga tahun 2011, masyarakat di Teluk Betung Selatan banyak yang berprofesi sebagai buruh yaitu 26.102 jiwa. Jumlah penduduk yang mendominasi sebagai buruh ini memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan penduduk masih cukup tinggi. Kelurahan Bumi Waras adalah salah satu kelurahan pesisir yang terdapat di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Berdasarkan data dari Kelurahan Bumi Waras, tingkat kemiskinan tersebut dibagi atas lima kategori yang didasari oleh jumlah anak, kondisi fisik rumah, serta tingkat penghasilan masyarakat. Pengkategorian tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1
Kategori Tingkat Kemiskinan Kelurahan Bumi Waras

No.	Kategori Tingkat Kemiskinan	Jumlah Keluarga
1	Keluarga Prasejahtera	1.304
2	Keluarga Sejahtera 1	1.145
3	Keluarga Sejahtera 2	313
4	Keluarga Sejahtera 3	171

5	Keluarga Sejahtera 3 plus	91
Total		**3024**

Sumber: Data Kelurahan Bumi Waras Tahun 2011

Berdasarkan data diatas, dapat kita ketahui bahwa tingkat kemiskinan di kelurahan Bumi Waras masih tergolong tinggi karena angka keluarga prasejahtera merupakan angka terbesar dari kategori tingkat kemiskinan di Kelurahan Bumi Waras yang menunjuk pada angka 1.304 keluarga dari jumlah total 3.024 keluarga.

Kemudian terkait masalah pencemaran lingkungan, dari hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Wiryawan dkk (2002), diketahui setidaknya terdapat 9 sungai yang bermuara ke laut pesisir Kota Bandar Lampung yang berpotensi mencemarkan wilayah pantai tersebut. Sungai-sungai tersebut adalah: Way Sukamaju, Way Keteguhan, Way Tataan, Way Belau, Way Kunyit, Way Kuala, Way Lunik, Way Pancoran, dan Way Galih. Sumber pencemaran yang yang berasal dari limbah industri diperkirakan berasal dari berbagai kegiatan industri yang berada di daerah aliran sungai (DAS) tersebut. Sebagai contoh, setidaknya terdapat 22 industri di DAS Way Kuala, 13 industri di DAS Way Lunik, 5 industri di DAS Way Pancoran, dan 2 industri di DAS Way Kunyit. Kemungkinan pencemaran industri juga terjadi di wilayah pelabuhan Panjang dan pelabuhan milik swasta yang berada di sekitar Kecamatan Panjang.

Berdasarkan pra *survey* yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Februari hingga Maret 2012 dengan salah satu gerakan *civil society* yang berada di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung yaitu LSM Jaringan Perempuan Pesisir, peneliti mendapatkan informasi bahwa "pemerintah

kurang memperhatikan masyarakat di Pesisir Kelurahan Bumi Waras Teluk Betung Selatan ini". Program-program yang dibuat oleh Jaringan Perempuan Pesisir untuk memberdayakan masyarakat pesisir ini tidak di barengi oleh peran serta dari pemerintah, hal ini di tandai dengan tidak adanya dukungan yang bersifat mengakomodir dan memfasilitasi kegiatan-kegiatn yang di jalankan serta tidak adanya bantuan yang berbentuk dana guna menunjang kegiatan pemberdayaan, Jaringan Perempuan Pesisir hanya dapat mengupayakan pengumpulan dana secara swadaya atau sumbangan sukarela dari masyarakat itu sendiri demi berlangsungnya program pemberdayaan.

Dari beberapa permasalahan tersebut, terkait pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir, maka peneliti dalam penelitianya tertarik untuk membahas tentang "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga Melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir, studi pada Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan."

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi yang dilakukan LSM Jaringan Perempuan Pesisir dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan?

2. Bagaimana hasil yang telah tercapai dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir ?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis strategi yang ditempuh LSM Jaringan Perempuan Pesisir dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan.
2. Untuk menganalisis hasil yang telah tercapai dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat strategi yang ditempuh LSM Jaringan Perempuan Pesisir dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Adminsitrasi Negara khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi:

a. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat memberdayakan masyarakat pesisir, khususnya dalam proses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya di kawasan pesisir.
b. Bagi pemerintah dapat dijadikan bahan evaluasi dan proyeksi dalam mengatasi permasalahan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.